PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Radar Hari: Rabu Tanggal: 25 Maret 2015 Halaman: 1

PERIZINAN

Petugas Dinzin Rawan Korupsi

JOGJA - Memiliki tugas dalam pelayanan perizinan ke masyarakat, petugas Dinas Perizinan (Dinzin) Kota Jogja dianggap rentan tersangkut kasus dan praktik korupsi. Hal itu pula yang membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara khusus mendatangi Balai Kota Timoho untuk memberi pembekalan pada personel Dinzin.

▸ Baca **Petugas...** Hal 7

Bangun Komitmen, Terapkan Transparansi

■ **PETUGAS...**

Sambungan dari hal 1

KPK secara khusus memberikan pelatihan training *Optimalisasi Pelayanan Masyarakat Satu Pintu* di Kota Jogja bagi puluhan petugas Dinzin. Menurut Spesialis Kampanye dan Sosialisasi Kedeputian Pencegahan KPK Mohammad Jhanattan, sebenarnya pemahaman pegawai Dinzin Kota Jogja mengenai pencegahan korupsi tergolong tinggi.

"Pegawai Dinzin harusnya jangan meminta atau menerima barang dalam bentuk apapun dari masyarakat, karena dampaknya tidak hanya saat itu tetapi bisa jangka panjang," katanya kemarin (24/3). Menurutnya, pelatihan mengenai transparansi layanan karena di instansi ini dimungkinkan terjadi praktik korupsi seperti suap, pemerasan hingga gratifikasi saat masyarakat mengurus berbagai perizinan.

Selain mengandalkan materi, KPK juga mendatangkan bus anti corruption learning center (ACLC) ke halaman Balai Kota Timoho. Para peserta pelatihan juga diajak untuk bisa mengakses layanan yang berisi pengenalan terhadap korupsi, mengenali gratifikasi serta pelaporan harta kekayaan penyelenggaran negara. "Bus antikorupsi ini kali pertama singgah di lingkungan pemerintah daerah, ya di Pemkot Jogja," terangnya.

Sementara itu Kepala Dinzin Kota Jogja Heri Karyawan mengakui, di Dinzin rentan terjadi praktik korupsi. Untuk itu pihaknya sudah membangun komitmen dengan seluruh pegawai di lingkungan Dinzin untuk menghindari hal itu, dengan menerapkan prinsip transparansi. "Ada kepastian untuk syarat, waktu dan biaya," jelasnya.

Heri menambahkan dalam pelayanan di Dinzin Kota Jogja juga sudah berlapis, mulai dari bagian penerimaan berkas hingga ke kepala dinas. "Mulai dari awal sudah terjaring, mana yang secara adminsitrasi dan teknis yang sudah atau belum memenuhui syarat. Jadi sebagai kepala dinas saya juga tidak bisa semena-mena," tuturnya. **(pra/laz/gp)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perizinan	Netral	Amat Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005